

Analisis wacana ekokritik: Representasi alam dan ideologi pembangunan dalam pidato Menteri Pertanian “Amran Sulaiman” (tentang penurunan harga pupuk 20%)

Dian Nur Lestari^{1*}, Saptono Hadi^{2*}, Agus Hermawan^{3*},
Redhitya Wempi Ansori^{4*}

¹²³⁴Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

*dian190703@gmail.com, saptono656@gmail.com, agushermawan8992@gmail.com,

redhityawempiansori@gmail.com



INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 Januari 2026

Direvisi : 9 Februari 2026

Disetujui : 17 Februari 2026

Dipublik : 2 Maret 2026

Kata kunci:

Ekokritik,

Analisis Wacana,

Kebijakan Pupuk,

Ideologi Pembangunan,

Amran Sulaiman.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini menganalisis diskursus ekologi dalam pidato Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, terkait kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20%. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka ekokritik Garrard, studi ini membedah bagaimana alam direpresentasikan di tengah narasi produktivitas. Hasil riset mengungkap adanya kontradiksi diskursif: di satu sisi, kebijakan ini diposisikan sebagai dukungan bagi petani, namun di sisi lain, ia memperkuat ideologi pembangunan antroposentris yang memandang alam sekadar komoditas input. Temuan menunjukkan bahwa narasi pemerintah masih didominasi oleh logika teknosentris yang berpotensi memicu degradasi lingkungan jangka panjang demi stabilitas ekonomi jangka pendek.

Abstract: This study analyzes ecological discourse in a speech by the Minister of Agriculture, Amran Sulaiman, regarding a policy to reduce fertilizer prices by 20%. Employing a descriptive qualitative approach with Garrard's ecocritical framework, the study examines how nature is represented within a narrative of productivity. The findings reveal a discursive contradiction: on the one hand, the policy is positioned as support for farmers; on the other hand, it reinforces an anthropocentric development ideology that views nature merely as a commodity input. The study further shows that government narratives remain dominated by a technocentric logic, which has the potential to trigger long-term environmental degradation in pursuit of short-term economic stability.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian kontemporer di Indonesia berada pada persimpangan krusial antara ambisi kedaulatan pangan dan urgensi kelestarian ekologis. Isu ini menjadi diskursus yang kompleks karena kebijakan produksi pangan dan intensifikasi lahan sering kali menciptakan tekanan signifikan terhadap daya dukung lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari et al. (2024), kebijakan yang berorientasi pada peningkatan hasil pertanian melalui intervensi input kimiawi seperti penggunaan pupuk secara masif memiliki keterkaitan linear dengan degradasi kualitas tanah dan ketidakseimbangan ekosistem mikro. Dalam konteks ini, alam sering kali diposisikan sebagai objek pasif yang harus ditaklukkan demi mencapai target-target numerik pembangunan.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik dalam sektor agraria bukan sekadar instrumen teknis, melainkan representasi dari proses diskursif yang sarat kepentingan. Bahar et al. (2025) menegaskan bahwa narasi kebijakan merupakan medan pertempuran ideologis di mana persoalan lingkungan dibingkai (*framed*) untuk selaras dengan paradigma pembangunan yang dominan. Ketika pemerintah, melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menggulirkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20%, narasi yang muncul cenderung didominasi oleh retorika keberpihakan pada kesejahteraan petani dan stabilitas pasar. Namun, di balik kerangka ekonomi tersebut, terdapat dimensi ekokritik yang

terabaikan: bagaimana diskursus tersebut mengonstruksi hubungan manusia dengan tanah dan sejauh mana ideologi pembangunan mengesampingkan batas-batas regenerasi alam.

Pembingkaiannya persoalan lingkungan dalam wacana publik kontemporer tidak lagi dapat dipandang sebagai penyampaian informasi teknis yang netral. Sebagaimana ditegaskan oleh Astawa (2025), wacana kebijakan publik saat ini merupakan praktik diskursif yang secara aktif mengonstruksi cara masyarakat memaknai realitas sosial dan ekologis. Dalam konteks ini, pidato pejabat publik mengenai input pertanian (seperti pupuk) bukan sekadar pengumuman administratif, melainkan sebuah upaya sistematis untuk memvalidasi paradigma pembangunan tertentu di atas kesadaran ekologis kolektif.

Kekuatan bahasa dalam mengarahkan persepsi ini dijelaskan lebih tajam dalam pengembangan mutakhir *Critical Discourse Analysis* (CDA) oleh Fairclough (2023). Ia menekankan bahwa bahasa kebijakan memiliki otoritas untuk memitigasi atau mengeksaserbasi krisis lingkungan melalui pilihan leksikal dan struktur wacana yang disengaja. Pilihan kata seperti "penurunan harga" atau "subsidi" sering kali digunakan sebagai tabir linguistik yang mengalihkan perhatian publik dari dampak ekosistemik jangka panjang menuju keuntungan ekonomi pragmatis. Oleh karena itu, pidato resmi kementerian harus dibedah sebagai instrumen ideologis yang membawa muatan kepentingan tersembunyi terhadap tata kelola sumber daya alam.

Sinergi antara muatan ideologis dan teknis penyampaian ini juga diperkuat oleh mekanisme pragmatik dalam komunikasi publik. Hermawan dan Hadi (2021) menunjukkan bahwa penggunaan tindak tutur, khususnya tindak tutur direktif yang dibalut dengan strategi kesantunan, berfungsi sebagai alat persuasi yang sangat efektif. Melalui mekanisme ini, kebijakan yang bersifat instruktif dapat diterima sebagai narasi yang "menolong," sehingga mematikan nalar kritis publik terhadap potensi kerusakan tanah akibat ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai praktik sosial yang tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi mendikte bagaimana subjek (petani dan masyarakat) harus merespons realitas ekologis tersebut.

Pada situasi krisis global saat ini, termasuk krisis lingkungan, bahasa kebijakan berperan penting dalam menormalisasi ideologi pembangunan. Fairclough, N. (2023) menegaskan proses naturalisasi dalam wacana kebijakan membuat pilihan-pilihan pembangunan, seperti efisiensi, produktivitas, dan stabilitas ekonomi, dipandang sebagai solusi yang wajar dan tidak problematis. Akibatnya, dampak ekologis yang menyertai kebijakan tersebut sering kali tidak tampil sebagai isu utama karena tertutupi oleh bahasa teknokratis yang berorientasi pada pertumbuhan. Dengan adanya hal tersebut, pidato Menteri Pertanian tentang penurunan harga pupuk sebesar 20% tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi semata. Dalam perspektif ekokritik kontemporer, Astawa, I. G. (2025) menyatakan wacana pembangunan pertanian kerap merepresentasikan alam sebagai objek yang dapat dikelola dan dikendalikan demi kepentingan manus.

Pidato tersebut berfungsi sebagai instrumen ideologis yang mereduksi alam menjadi sekadar sarana produksi dalam kerangka pembangunan antroposentris, mengabaikan batasan sistem ekologis yang kompleks. Sejalan dengan pergeseran paradigma ekokritik kontemporer yang kini menyasar teks non-sastra dan wacana kebijakan (Nuryanti et al. & Mufidah, 2025, Wiryawan, 2025), analisis terhadap narasi pertanian menjadi krusial untuk menyingkap bagaimana bahasa teknokratis sering kali membungkus logika eksploitatif dengan eufemisme keberlanjutan. Hariati (2025) serta Stibbe (2025) menegaskan bahwa wacana kebijakan ini menciptakan "cerita dominan" yang mengonstruksi alam sebagai objek optimasi demi kepentingan manusia, sehingga mengubah kebijakan publik menjadi arena kontestasi makna yang menentukan apakah alam diposisikan sebagai mitra ekologis yang setara atau hanya sebagai komoditas industri.

Analisis terhadap pidato kebijakan pertanian menjadi instrumen krusial untuk menyingkap bagaimana bahasa secara aktif membangun atau justru mengaburkan kesadaran ekologis melalui pola naratif yang disebut sebagai *stories we live by* (Nasarudin et al., 2025; Stibbe dlm Hariati, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar cermin realitas, melainkan medium pembentuk karakter dan tanggung jawab moral yang selaras dengan nilai bernalar kritis, sebagaimana yang ditemukan dalam diskursus pendidikan (Hadi & Nadlifah, 2023). Dengan demikian, baik dalam ranah kebijakan publik maupun pedagogi, wacana berfungsi sebagai perangkat strategis yang mendikte cara subjek memaknai relasi antara pembangunan dan keberlanjutan realitas ekologis. Analisis bahasa kebijakan menjadi instrumen krusial dalam menyingkap dampak ekologis yang tersembunyi di balik struktur wacana, di mana Anam (2024) mengategorikannya ke dalam diskursus bermanfaat (*beneficial*), ambivalen, atau destruktif. Ketidakteraturan leksikal dalam teks resmi, sebagaimana disoroti oleh Hermawan dan Zahro (2021), berisiko mengaburkan relasi ekologis yang kompleks dan memperkuat

narasi destruktif yang mereproduksi metafora efisiensi serta produktivitas jangka pendek (Hariati, 2025). Dalam perspektif ekolinguistik kritis, pidato Menteri Pertanian tersebut mengonstruksi "cerita dominan" yang mereduksi alam menjadi objek kendali negara, yang menurut Ardiansyah et al. (2023), memiliki dampak material nyata dalam membentuk pola interaksi petani terhadap ekosistem.

Pendekatan ekolinguistik kritis, sebagaimana diartikulasikan oleh Setyonegoro dan Priyanto (2025), menjadi krusial dalam menyingkap bagaimana pidato kebijakan pertanian mengonstruksi paradigma pembangunan yang melampaui sekadar kalkulasi ekonomi. Mengacu pada teori *new materialism*, Syafrudin dan Maiwan (2023) menegaskan bahwa kebijakan publik harus dipahami sebagai praktik diskursif-material yang secara aktif membentuk relasi fisik antara manusia dengan elemen tanah, pupuk, dan bahan kimia. Ketika bahasa kebijakan mereduksi entitas material tersebut menjadi instrumen teknis demi target produksi sebagaimana diperingatkan oleh Muhtar et al. (2025) terjadi pengabaian sistematis terhadap agensi material dan relasi ekologis yang kompleks. Konsekuensinya, menurut Hariati (2025), negasi terhadap agensi alam dalam wacana resmi ini berisiko melanggengkan krisis ekologis struktural yang mengancam keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Dalam konstelasi kebijakan agraria kontemporer, pidato Menteri Pertanian mengenai penurunan harga pupuk sebesar 20% tidak dapat dipahami secara reduksionis hanya sebagai instrumen ekonomi makro. Lebih dari sekadar intervensi fiskal, pidato ini merupakan sebuah teks kebijakan strategis yang menjalankan praktik diskursif dalam mengonstruksi representasi alam dan entitas pertanian. Bahasa yang digunakan dalam narasi resmi tersebut berpotensi besar mereproduksi ideologi pembangunan pertanian modern yang bersifat hegemonik, di mana alam diposisikan secara instrumental sebagai objek kendali negara demi mengejar target produksi linear dan stabilitas pasar. Dalam kerangka ini, lingkungan sering kali dikomodifikasi dalam struktur bahasa yang mengabaikan batasan biologis tanah, sehingga menciptakan tegangan antara retorika kesejahteraan petani dan integritas ekosistem jangka panjang.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap diskursus penurunan harga pupuk ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) yang menjembatani aspek linguistik terapan dengan realitas ekologis. Penelitian ini melampaui analisis tekstual konvensional dengan membedah persinggungan antara bahasa kebijakan, ideologi pembangunan, dan krisis ekologis yang laten. Dengan mengeksplorasi bagaimana "pupuk murah" dibingkai dalam wacana publik, studi ini bertujuan menyingkap struktur kekuasaan yang mendikte relasi antara manusia dan alam, sekaligus memberikan kritik terhadap narasi pembangunan yang sering kali mengabaikan agensi material lingkungan. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mendekonstruksi "cerita dominan" dalam kebijakan publik yang berisiko melanggengkan praktik eksploitatif di bawah selubung bantuan ekonomi.

Pidato Menteri Pertanian merupakan arena kontestasi ideologis yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi secara aktif mengonstruksi makna relasi antara manusia dan alam melalui pilihan leksikal dan pola argumentasi yang membangun "cerita dominan" tentang produktivitas (Mahardika et al., 2025, Astawa, 2025). Dengan mengintegrasikan kerangka *Critical Discourse Analysis* mutakhir, ekokritik kontemporer, ekolinguistik kritis, dan *new materialism*, penelitian ini mengisi celah literatur yang selama ini cenderung parsial dalam membedah kebijakan pupuk sebagai praktik diskursif-material. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan mendekonstruksi bagaimana bahasa kebijakan mereproduksi ideologi pembangunan modern, sekaligus menuntut kesadaran berpikir kritis (Novilia et al., 2023) untuk menyingkap dampak ekologis nyata yang dihasilkan dari artikulasi kekuasaan antara negara, petani, dan lingkungan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis yang dioperasionalkan melalui metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Rancangan deskriptif-analitis ini bertujuan untuk mendekonstruksi pidato Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai kebijakan penurunan harga pupuk sebagai sebuah praktik kekuasaan yang sarat kepentingan ideologis, bukan sekadar komunikasi teknis. Strategi ini diperkuat dengan integrasi kajian Ekokritik Greg Garrard guna membedah representasi lingkungan dalam teks. Sebagaimana ditegaskan oleh Zahroh (2024), integrasi ini krusial untuk mengungkap bagaimana diskursus antroposentris sering kali melegitimasi eksploitasi alam demi ambisi pembangunan ekonomi, sekaligus mengidentifikasi apakah alam diposisikan sebagai subjek berdaulat atau sekadar komoditas. Data penelitian mencakup satuan lingual berupa kata, kalimat, dan metafora yang ditranskripsi dari video *Breaking News* pada kanal YouTube tvOneNews (Oktober 2025). Pemilihan sumber data ini didasarkan pada argumen Maulida et

al. (2025) dan Marzuki (2023) bahwa dokumen audiovisual yang merepresentasikan peristiwa publik merupakan sumber informasi primer yang kaya akan muatan ideologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dengan metode lanjutan Simak Bebas Lipat Cakap (SBLC), di mana peneliti berperan sebagai *human instrument* yang menyimak tanpa intervensi (Ninditya, 2025). Proses ini diikuti dengan teknik rekam dan teknik catat ortografis guna menjamin keutuhan data linguistik sebelum diklasifikasikan ke dalam kartu data penelitian (Sudaryanto, 2015, Seafinus, 2022). Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh studi dokumentasi dan penggunaan kartu data sistematis untuk mencatat kategori ekolinguistik seperti leksikalisasi, metaforisasi, hingga modalitas (Sari, 2023, Harmi & Sumarto, 2024). Penentuan keabsahan data dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap transkripsi untuk menelaah strategi wacana seperti legitimasi, naturalisasi, dan instrumentalisasi. Hal ini selaras dengan pandangan Aziz (2021) dan Putri (2025) bahwa instrumen audiovisual memerlukan ketelitian dalam menangkap bagian tuturan yang mengandung bias ideologi pembangunan pertanian modern agar dapat dianalisis secara mendalam dalam kerangka ekokritik. Tahap akhir metodologi ini adalah analisis data yang mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022, Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui segmentasi dan klasifikasi data berdasarkan bentuk representasi alam serta strategi reproduksi ideologi pembangunan (Prayogi, 2023). Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan mikro-linguistik pada level teks dengan konteks sosiopolitik makro untuk menjelaskan dampak material kebijakan terhadap lingkungan. Sesuai pandangan Novilia et al. (2023), prosedur ini diharapkan mampu mengungkap secara kritis bagaimana bahasa kebijakan membentuk relasi antara negara, petani, dan alam dalam peta jalan pembangunan pertanian Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Ekokritik dan Ekolinguistik Kritis: Representasi Alam Pidato Menteri Pertanian Studi Penurunan Harga Pupuk

Dalam perspektif ekokritik dan ekolinguistik kritis, pidato Menteri Pertanian mengenai penurunan harga pupuk sebesar 20% menunjukkan adanya konstruksi alam sebagai entitas pasif yang sepenuhnya berada di bawah kendali teknokratis negara. Alam tidak lagi direpresentasikan sebagai sistem ekologis yang berdaulat, melainkan direduksi menjadi "ruang produksi" yang nilai keberadaannya hanya diakui sejauh ia mampu merespons input kimiawi untuk mencapai target kuantitatif. Penurunan harga pupuk dibingkai sebagai narasi penyelamatan, namun secara implisit, wacana ini memperkokoh pandangan bahwa kesuburan tanah adalah komoditas yang dapat dibeli, mengabaikan agensi material tanah sebagai organisme hidup yang memiliki batas regenerasi fisik.

Gambar 4.1 Representasi Alam dalam Kebijakan Pertanian



Strategi ekolinguistik dalam pidato ini menciptakan "cerita yang menyedihkan" (*destructive stories we live by*) dengan menaturalisasi ketergantungan pada zat kimia sebagai satu-satunya nalar logis dalam pembangunan pertanian modern. Melalui pilihan leksikal yang berfokus pada efisiensi ekonomi dan stabilitas harga, wacana ini melakukan depolitisasi terhadap risiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Ideologi pembangunan yang diusung secara hegemonik memosisikan intervensi teknologi kimia sebagai pahlawan bagi kesejahteraan petani, sementara degradasi kualitas ekosistem mikro dalam tanah disembunyikan di balik retorika keberpihakan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa bahasa kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk melanggengkan antroposentrisme radikal, di mana kepentingan stabilitas pasar sesaat dimenangkan atas keberlanjutan metabolisme alam.

Tabel 4.1 Data Representasi Alam dalam Pidato Menteri Pertanian

No	Jenis bahasa kebijakan	Kode data	Data	Durasi	Kutipan Verbatim	Bentuk Kebahasaan	Strategi Representasi Alam	Dimensi Ekokritik	Indikator Ekolinguistik Kritis	Makna Ideologis Awal
1.	Leksikalisasi	001/AWE/LEK/VY/22025	Penurunan harga pupuk 20%	3.26-3.28	"Harga turun 20%."	Leksikon kuantitatif	Alam dikalkulasi secara ekonomis	Komodifikasi	Rasionalitas fiskal	Alam direduksi menjadi angka
		002/AWE/LEK/VY/22025	Kenaikan produksi pertanian	4.09-4.12	"Produksi naik signifikan."	Leksikon produktivitas	Alam sebagai sumber output	Modernisasi pertanian	Narasi pertumbuhan	Alam = mesin produksi
		003/AWE/LEK/VY/22025	Efisiensi distribusi pupuk	2.15-2.18	"Efisiensi distribusi pupuk."	Terminologi manajerial	Alam dalam skema tata kelola	Rasionalisasi tata kelola	Skema lulu-hilir	Alam masuk sistem manajemen
		004/AWE/LEK/VY/22025	Volume produksi pupuk nasional	1.45-1.50	"Volume 9,55 juta ton."	Data kuantitatif teknis	Alam sebagai komoditas terukur	Instrumentalisasi	Framing ekologis-ekonomis	Alam diposisikan sebagai stok
		005/AWE/LEK/VY/22025	Revitalisasi sektor pupuk	0.52-0.58	"Revitalisasi sektor pupuk."	Leksikon pembangunan	Alam sebagai objek restrukturisasi	Biokratisasi sumber daya	Regulasi sebagai kontrol	Intervensi dinaturalisasi
2.	Metaforisasi	001/AWE/MET/VY/22025	Pupuk sebagai unsur vital pertanian	0.13-0.17	"Pupuk adalah udaranya pertanian."	Metafora biologis	Alam sebagai unsur vital produksi	Instrumentalisasi	Framing ekologis-ekonomis	Alam penting sejauh menopang produksi
		002/AWE/MET/VY/22025	Penguatan sektor pertanian	4.20-4.25	"Kita dorong sektor pertanian lebih kuat."	Metafora kekuatan	Alam sebagai entitas yang harus diperkuat	Modernisasi	Narasi pertumbuhan	Alam = sektor yang bisa dipacu
		003/AWE/MET/VY/22025	Peran pertanian dalam ketahanan pangan	3.40-3.45	"Menopang ketahanan pangan."	Metafora penopang	Alam sebagai fondasi stabilitas negara	Instrumentalisasi	Kepentingan nasional	Alam demi agenda negara
3.	Transitivitas	001/AWE/TRA/VY/22025	Jamian peningkatan produksi	4.09-4.15	"Kami pastikan produksi naik."	Aktif-negara sebagai aktor	Negara mengendalikan alam	Rasionalisasi tata kelola	Regulasi kontrol	Negara dominan atas alam
		002/AWE/TRA/VY/22025	Kebijakan penurunan harga pupuk	3.10-3.15	"Kita turunkan harga pupuk."	Aktif-kelekrif	Intervensi langsung	Biokratisasi	Narasi pertumbuhan	Alam dikendalikan kebijakan
		003/AWE/TRA/VY/22025	Perbaikan sistem distribusi	2.50-2.55	"Distribusi diperbaiki."	Pasif	Proses tanpa aktor jelas	Nominalisasi tudakan	Regulasi sistemik	Intervensi dinaturalisasi
		004/AWE/TRA/VY/22025	Peningkatan produksi nasional	5.00-5.05	"Produksi ditingkatkan."	Pasif	Fokus pada hasil	Modernisasi	Narasi pertumbuhan	Alam sebagai target peningkatan
4.	Modalitas	001/AWE/MOD/VY/22025	Proyeksi kenaikan produksi	4.09-4.15	"Akan naik."	Prediktif	Kepastian hasil	Modernisasi	Narasi progres	Masa depan dikontrol negara
		002/AWE/MOD/VY/22025	Kewajiban menjaga sistem pertanian	3.26-3.30	"Harus kita jaga."	Deontik (keharusan)	Normalisasi intervensi	Instrumentalisasi	Kepentingan nasional	Kontrol dianggap kewajiban
		003/AWE/MOD/VY/22025	Penegasan jaminan kebijakan	2.00-2.05	"Kita pastikan."	Epistemik kuat	Klaim otoritas	Rasionalisasi	Regulasi	Negara legitim sebagai pengendali
5.	Nominalisasi	001/AWE/NOM/VY/22025	Program revitalisasi industri pupuk	0.52-0.58	"Revitalisasi sektor pupuk."	Nominalisasi proses	Intervensi jadi konsep	Biokratisasi	Regulasi kontrol	Timbukan dismanakan
		002/AWE/NOM/VY/22025	Kebijakan penurunan harga pupuk	3.15-3.20	"Penurunan harga."	Nominalisasi kebijakan	Fokus hasil bukan aktor	Komodifikasi	Rasionalitas fiskal	Kebijakan terkesan alami
		003/AWE/NOM/VY/22025	Target peningkatan produksi nasional	4.10-4.15	"Peningkatan produksi."	Nominalisasi output	Alam sebagai target kuantitatif	Modernisasi	Narasi pertumbuhan	Alam diukur capaian

Merujuk data temuan, analisis akan bergerak melampaui deskripsi tekstual menuju dekonstruksi ideologis, artinya analisis tidak dimulai dari kutipan acak, melainkan dari pemetaan fungsi bahasa terhadap realitas ekologis. Narasi analisis dekonstruksi leksikal, mendeskripsikan bagaimana alam sebagai "Objek Statis", Analisis pilihan kata (diksi) yang digunakan Menteri Pertanian fokus pada bagaimana kata "pupuk", "tanah", dan "produksi" ditempatkan. Dekonstruksi leksikal alam sebagai "Objek Statis", analisis terhadap pilihan kata (diksi) yang digunakan oleh Menteri Pertanian dalam data 001/LEK hingga 005/LEK menunjukkan dominasi penggunaan leksikon yang bersifat kuantitatif, manajerial, dan teknokratis. Penggunaan kata-kata kunci seperti "penurunan harga", "kenaikan produksi", "volume", "produksi", dan "revitalisasi" mencerminkan cara pandang yang sangat mekanistik terhadap sektor agraria.

Apakah alam (tanah) direpresentasikan sebagai subjek yang hidup atau sekadar "wadah" bagi input kimia? Analisis merujuk pada mekanisme alam sebagai wadahnya input kimia, maknanya bahwa dalam wacana ini, alam khususnya tanah tidak direpresentasikan sebagai subjek biologis yang hidup atau ekosistem yang mandiri. Sebaliknya, alam diposisikan sekadar sebagai "wadah" atau medium teknis bagi input kimia (pupuk). Ketika Menteri menyebutkan "Volume 9,55 juta ton" (Data 004/LEK), fokus perhatian dialihkan sepenuhnya pada ketersediaan material industri, bukan pada daya dukung tanah. Alam direduksi menjadi objek statis yang dapat dimanipulasi melalui kalkulasi ekonomi dan distribusi logistik. Tidak ada ruang bagi agensi material alam; tanah dianggap sebagai variabel tetap yang hanya menunggu intervensi manusia untuk menjadi produktif.

Implementasi kategori *destructive discourse* (Anam, 2024), teridentifikasi bahwa jika menteri hanya menyebut "peningkatan hasil" tanpa menyebut "kesehatan tanah", maka alam sedang direpresentasikan secara instrumental. *Destructive* dan *instrumentalisasi* merujuk kategori Anam (2024) pidato ini dapat diklasifikasikan sebagai *destructive discourse* (wacana destruktif). Hal ini terlihat jelas dari ketimpangan narasi: Menteri secara agresif menekankan "peningkatan produksi" (Data 002/LEK) dan "kenaikan signifikan", namun secara total mengabaikan variabel "kesehatan tanah" atau "keberlanjutan ekologis". Dengan mengabaikan aspek biologis dan hanya menonjolkan aspek output, alam sedang direpresentasikan secara **instrumental**. Representasi ini melegitimasi praktik eksploitasi lahan demi target makroekonomi, di mana alam dipaksa berfungsi seperti mesin produksi yang kinerjanya hanya diukur dari angka-angka fiskal.

Secara ekokritik, temuan ini menyingkapkan adanya hegemoni antroposentrisme radikal dalam wacana kebijakan negara, di mana alam (tanah) mengalami proses alienasi dari integritas biologisnya menjadi sekadar aset kapital yang terukur. Dengan menempatkan tanah sebagai "wadah pasif" bagi input kimiawi, wacana Menteri Pertanian telah melakukan objektifikasi material yang mendehumanisasi hubungan manusia dengan bumi; tanah tidak lagi dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk sehat (*right to be healthy*), melainkan sebagai komoditas yang "diperbudak" oleh target-target makroekonomi. Reduksi alam menjadi angka-angka fiskal dan volume produksi (Data 004/LEK) mencerminkan ideologi *technological-fix* yang berbahaya, karena menutup mata terhadap batas-batas biofisik tanah demi mengejar pertumbuhan kuantitatif. Akibatnya, representasi instrumental ini tidak hanya merusak nalar ekologis publik, tetapi juga melegitimasi praktik eksploitasi

lahan tanpa pemulihan, di mana metabolisme alam dipaksa tunduk pada ritme industri kimia yang pada akhirnya akan mengakibatkan keruntuhan daya dukung lingkungan secara struktural.

Mekanisme analisis metaforisasi "Pupuk sebagai Penyelamat", meneliti aspek metafora yang digunakan dalam pidato teridentifikasi bahwa seringkali dalam pidato politik, input kimia dibingkai dengan metafora medikal atau militer (contoh nukilan teks, "amunisi untuk ketahanan pangan"). Pada tahap ini, analisis difokuskan pada penggunaan bahasa figuratif dalam data 001/MET hingga 003/MET menyingkap penggunaan bahasa kiasan yang sangat kuat untuk melegitimasi intervensi kimiawi. Metafora yang dipilih oleh Menteri Pertanian bukan sekadar pemanis retorika, melainkan instrumen kognitif yang membentuk cara masyarakat memahami peran alam dalam skema pembangunan.

Metafora ini cenderung menormalisasi ketergantungan pada zat kimia. Dalam ekolinguistik kritis (Stibbe, 2025), ini membangun *story we live by* bahwa tanpa intervensi kimiawi yang masif, alam dianggap tidak berdaya (*infertil*). Data 001/MET menyajikan temuan krusial melalui kutipan, "Pupuk adalah udaranya pertanian." Penggunaan metafora biologis "udara" di sini sangat manipulatif secara ekolinguistik. Udara adalah unsur alami yang esensial dan tak tergantikan bagi kehidupan. Dengan menyamakan pupuk (produk industri kimia) dengan udara, wacana ini melakukan naturalisasi ketergantungan. Berdasarkan perspektif Stibbe (2025), ini membangun *story we live by* (cerita yang kita hayati) bahwa tanpa intervensi kimiawi yang masif dari negara, alam dianggap dalam kondisi infertil atau tidak berdaya. Alam diposisikan sebagai pasien yang mengalami "sesak napas" dan hanya bisa bernapas kembali melalui pasokan subsidi pupuk.

Implikasi, alam direpresentasikan sebagai entitas yang cacat yang harus "diperbaiki" oleh teknologi negara. Maknanya implikasi dari metafora tersebut adalah terciptanya representasi alam sebagai entitas yang cacat secara fungsional. Melalui metafora kekuatan seperti "Kita dorong sektor pertanian lebih kuat" (Data 002/MET), terdapat asumsi implisit bahwa kondisi alami tanah saat ini "lemah" dan memerlukan "penguatan" eksternal. Alam tidak lagi dipandang sebagai mitra yang memiliki sistem regenerasi mandiri, melainkan objek yang harus "diperbaiki" oleh teknologi dan regulasi negara. Hal ini memperkuat ideologi teknosentris, di mana agensi material tanah (mikroorganisme dan unsur hara alami) sepenuhnya disubordinasi oleh agensi teknologi manusia demi kepentingan "ketahanan pangan" (Data 003/MET) yang bersifat antroposentris.

Secara ekokritik, metafora "pupuk sebagai udara" dan narasi "penguatan" ini membongkar adanya diskriminasi ontologis terhadap alam, di mana ekosistem tanah dipandang sebagai entitas yang cacat bawaan (*inherently deficient*) dan tidak berdaya tanpa asistensi teknologi manusia. Dengan membingkai produk kimia industri sebagai elemen vital layaknya oksigen, wacana ini telah melakukan kolonisasi kognitif yang menghapus ingatan kolektif tentang kemampuan regenerasi mandiri bumi, sekaligus melegitimasi dominasi antroposentris atas metabolisme tanah. Implikasi representasi alam yang "lemah" dan "sesak napas" ini tidak hanya menormalisasi ketergantungan pada zat kimia, tetapi juga menciptakan pembenaran moral bagi negara untuk terus melakukan intervensi teknokratis yang invasif. Akibatnya, hubungan timbal balik antara manusia dan bumi bergeser menjadi hubungan kekuasaan yang bersifat patologis; di mana tanah tidak lagi dihormati sebagai mitra ko-evolusi yang berdaulat, melainkan diposisikan sebagai "pasien abadi" yang agensi alamnya harus dimatikan demi menjaga ritme produksi pangan industrial yang artifisial.

Analisis transitivitas Hegemoni subjek atas objek, merujuk pada "Siapa Subjek, Siapa Objek?". Implementasi kerangka Halliday atau Fairclough untuk melihat struktur kalimat menunjuk siapa yang memegang peran agen (pelaku) dan siapa yang menjadi goal (sasaran). Analisis transitivitas pada data 001/TRA hingga 004/TRA menyingkap struktur kekuasaan dalam wacana melalui pemetaan aktor (Agen) dan sasaran (Goal). Artinya Melalui analisis struktur kalimat pada data transitivitas (001/TRA - 004/TRA), terlihat jelas pembagian peran antara aktor negara dan lingkungan. Berdasarkan kerangka Fairclough, pilihan struktur kalimat aktif dan pasif dalam pidato ini secara konsisten mendefinisikan ulang batas-batas agensi antara manusia dan lingkungan.

Analisis menunjuk paradigma, bahwa biasanya, "Negara" atau "Menteri" menjadi agen aktif (yang menurunkan harga, yang mengatur, yang menyelamatkan), sementara "Alam" dan "Petani" menjadi objek pasif yang menerima perlakuan. Identifikasi hegemoni negara atas alam yang pasif, tampak dalam setiap pernyataan aktif seperti data 001/TRA ("Kami pastikan produksi naik") dan 002/TRA ("Kita turunkan harga pupuk"), negara/menteri secara konsisten menempati peran sebagai agen aktif (pelaku) dominan yang memiliki kendali penuh. Sebaliknya, "produksi" dan "harga" (yang merupakan representasi nilai ekonomi alam) diposisikan sebagai goal (sasaran) yang dimanipulasi. Penggunaan kalimat pasif dalam data 004/TRA ("Produksi ditingkatkan") semakin mempertegas

penghilangan aktor ekologis; fokus wacana tetap pada hasil, bukan pada subjek ekologis; fokus wacana dialihkan sepenuhnya pada hasil akhir (output) tanpa memberikan ruang bagi alam untuk menunjukkan agensi materialnya. Alam digambarkan sebagai penerima perlakuan teknokratis yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau bernegosiasi.

Analitik ekokritik mendeskripsikan bahwa ini menunjukkan posisi antroposentris yang ekstrem, di mana agensi material alam (kemampuan tanah untuk regenerasi secara alami) dihilangkan dari wacana publik. Dominasi antroposentrisme radikal, dari perspektif ekokritik, pola transitivitas ini merepresentasikan posisi antroposentris yang ekstrem. Dengan menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor yang "memastikan" dan "memperbaiki", pidato ini secara sistematis menghilangkan agensi material alam yakni kemampuan biologis tanah untuk beregenerasi dan memproses nutrisi secara mandiri. Alam hanya hadir dalam teks ketika ia telah dikonversi menjadi kebijakan atau target produksi nasional. Hal ini mengonfirmasi bahwa dalam kesadaran diskursif kebijakan tersebut, hubungan manusia dan alam bukanlah hubungan timbal balik (interdependensi), melainkan hubungan subjek-objek yang bersifat eksploitatif, di mana integritas lingkungan dikorbankan demi legitimasi politik dan stabilitas pasar.

Tinjauan analisis aspek transitivitas berupaya membedah struktur gramatikal untuk melihat relasi kekuasaan antara manusia (negara) dan alam. Material analisis merujuk "Siapa Subjek, Siapa Objek?". Penggunaan kerangka Halliday dan Fairclough pada data 001/TRA hingga 004/TRA menyingkap bagaimana struktur kalimat secara sistematis membagi peran antara pelaku dan sasaran. Dalam analisis ini, terlihat jelas pola dominasi yang menempatkan aktor manusia di pusat kendali, sementara alam ditarik ke dalam posisi pasif yang tidak memiliki suara. Negara sebagai agen aktif vs alam sebagai sasaran pasif, tampak secara gramatikal, "Negara" atau "Menteri" secara konsisten menduduki peran sebagai agen (*actor*) yang memegang kendali penuh. Hal ini terlihat pada kutipan "*Kami pastikan produksi naik*" (Data 001/TRA) dan "*Kita turunkan harga pupuk*" (Data 002/TRA). Dalam struktur ini, negara diposisikan sebagai subjek yang memiliki kehendak dan otoritas untuk mengubah keadaan. Sebaliknya, "Alam" dan produk-produk ekologisnya hanya muncul sebagai goal (sasaran) atau objek yang menerima perlakuan. Penggunaan kalimat pasif seperti "*Produksi ditingkatkan*" (Data 004/TRA) semakin menegaskan penghilangan agensi alam; alam tidak dianggap "bertumbuh" secara mandiri, melainkan "ditumbuhkan" oleh kebijakan birokrasi.

Meninjau poin of view ekokritik, penghapusan agensi material alam ini, dalam perspektif ekokritik, pola transitivitas ini mencerminkan posisi antroposentrisme yang ekstrem. Dengan memusatkan seluruh agensi pada figur menteri atau negara, wacana ini secara sistematis menghapus agensi material alam yakni kemampuan intrinsik tanah dan organisme di dalamnya untuk melakukan metabolisme dan regenerasi secara alami. Alam tidak lagi dianggap sebagai sistem yang memiliki dinamika internal, melainkan sekadar instrumen yang "menunggu" instruksi kebijakan. Implikasi ekologis dari struktur bahasa ini adalah normalisasi dominasi manusia; di mana alam dianggap tidak memiliki kedaulatan biologis dan keberadaannya sepenuhnya bergantung pada manajemen teknologi serta kontrol politik negara.

Analisis ideologi pembangunan khususnya tinjauan antroposentrisme vs ekosentrisme, berupaya menghubungkan temuan bahasa dengan ideologi pembangunan, khususnya analisis bagaimana penurunan harga pupuk 20% dikonstruksikan sebagai "keberhasilan ekonomi" yang menutup mata terhadap "beban ekologis". Narasi penurunan harga pupuk dikonstruksikan sebagai sebuah "keberhasilan mutlak", implementasi argumen Hariati (2025) tentang bagaimana bahasa kebijakan menyederhanakan relasi ekologis yang kompleks menjadi angka-angka pertumbuhan. Reduksi ekologi dalam angka pertumbuhan, melalui data modalitas (001/MOD – 003/MOD) dan nominalisasi (001/NOM – 003/NOM), kebijakan penurunan harga pupuk 20% diposisikan sebagai jaminan kepastian masa depan ("*Akan naik*"). Sesuai dengan argumen Hariati (2025), bahasa kebijakan ini melakukan penyederhanaan radikal atas realitas ekologis yang kompleks. Istilah seperti "*Revitalisasi*" dan "*Peningkatan produksi*" menyembunyikan proses fisik penggunaan bahan kimia yang masif. Penurunan harga bukan lagi dilihat sebagai risiko pencemaran tanah, melainkan murni sebagai prestasi fiskal. Dengan cara ini, kebijakan tersebut menutup mata terhadap "beban ekologis" (seperti degradasi hara dan keasaman tanah) demi menonjolkan "keberhasilan ekonomi" yang bersifat instan.

Sintesis representasi alam merujuk pada kesatuan legitimasi *infinite growth*, artinya alam akhirnya dibangun sebagai sumber daya tak terbatas yang harus dipacu produktivitasnya, melegitimasi pertumbuhan tanpa batas (*infinite growth*) di atas planet yang terbatas. Universal, ideologi pembangunan yang direproduksi adalah modernism pertanian radikal, yang melegitimasi pertumbuhan tanpa batas (*infinite growth*) di atas planet yang memiliki batas-batas biofisik. Alam diposisikan sebagai

variabel yang harus tunduk pada target kuantitatif negara (“*Alam diukur capaian*” pada Data 003/NOM). Representasi ini tidak hanya bersifat antroposentris karena mengutamakan kebutuhan manusia di atas kesehatan bumi, tetapi juga berbahaya secara ekolinguistik karena menciptakan ilusi bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai hanya melalui manipulasi harga dan input kimia, tanpa perlu menjaga integritas material alam itu sendiri.

Analisis ideologi pembangunan berdasarkan konfrontasi narasi pertumbuhan ekonomi dengan realitas keterbatasan ekologis, seluruh temuan bahasa dihubungkan dengan ideologi pembangunan yang dianut pemerintah. Analisis ini membongkar bagaimana penurunan harga pupuk sebesar 20% dikonstruksikan sebagai sebuah “keberhasilan ekonomi” yang secara sengaja menutup mata terhadap konsekuensi ekologis jangka panjang. Penyederhanaan relasi ekologis menjadi angka pertumbuhan, artinya merujuk pada argumen Hariati (2025), bahasa kebijakan dalam pidato ini melakukan reduksi radikal terhadap relasi ekologis yang kompleks menjadi sekadar angka-angka pertumbuhan fiskal. Melalui data modalitas prediktif seperti “*Akan naik*” (Data 001/MOD) dan klaim otoritas “*Kita pastikan*” (Data 003/MOD), negara menciptakan ilusi kendali penuh atas masa depan. Keberhasilan pembangunan hanya diukur melalui variabel kuantitatif (output produksi dan harga), sementara degradasi kualitas tanah, hilangnya biodiversitas mikroba, dan polusi kimiawi dianggap sebagai residu yang tidak perlu disebutkan dalam wacana publik.

Secara ekokritik, wacana ini merepresentasikan alam sebagai sumber daya tak terbatas yang harus dipacu produktivitasnya secara terus-menerus. Hal ini melegitimasi ideologi *infinite growth* di atas planet yang secara fisik memiliki keterbatasan (*planetary boundaries*). Alam dibangun bukan sebagai sistem yang harus dijaga keseimbangannya, melainkan sebagai mesin yang harus dioptimalkan efisiensinya. Dampaknya, representasi ini menaturalisasi eksploitasi lahan dan mengabaikan sinyal-sinyal krisis ekologis, demi mempertahankan narasi kemajuan ekonomi yang bersifat antroposentris.

Ekokritik memandang keseluruhan strategi wacana ini merupakan bentuk imperialism ontologis terhadap alam, di mana integritas bumi ditundukkan sepenuhnya di bawah logika pasar dan kekuasaan birokrasi. Dengan membingkai ketergantungan kimiawi sebagai kemajuan ekonomi, pidato ini telah membungkam “suara” tanah yang mengalami kelelahan biologis akibat praktik intensifikasi yang berlebihan. Penghapusan agensi material alam dalam struktur bahasa ini menunjukkan bahwa ideologi pembangunan kita masih terjebak pada mitos penaklukan alam; sebuah cara pandang yang tidak hanya memicu krisis lingkungan yang lebih dalam, tetapi juga menjauhkan manusia dari kesadaran bahwa kedaulatan pangan sejati hanya mungkin dicapai melalui pemulihan hubungan timbal balik yang setara dengan bumi, bukan melalui manipulasi harga dan zat kimia semata.

Matriks ini menyatukan temuan linguistik mikro (Leksikon/Metafora) dengan dampak ideologis makro (Ekokritik/New Materialism) dalam satu kerangka kerja yang padu.

Tabel 4.7 Matriks Temuan Analisis: Dekonstruksi Wacana Kebijakan Pupuk

Dimensi Analisis	Temuan Utama (Evidence)	Strategi Representasi Alam	Dampak Material & Ideologis
Linguistik Mikro (Leksikalisasi & Nominalisasi)	Penggunaan leksikon kuantitatif (20%, 9,55 juta ton) dan kata benda abstrak (<i>Revitalisasi, Peningkatan</i>).	Komodifikasi & Abstraksi: Alam dihitung sebagai unit stok ekonomi. Tindakan intervensi disamakan menjadi konsep birokrasi.	Reduksionisme: Alam kehilangan agensi biologisnya dan hanya dipandang sebagai variabel dalam neraca fiskal negara.
Linguistik Meso (Metaforisasi)	“ <i>Pupuk adalah udaranya pertanian.</i> ”	Naturalisasi Ketergantungan: Zat kimia (input luar) diposisikan setara dengan unsur alami yang vital.	Discourse of Deficiency: Alam dianggap “cacat” atau “sesak napas” tanpa intervensi teknologi kimiawi berkelanjutan.
Linguistik Makro (Transitivitas & Modalitas)	Negara/Mentan sebagai Agen Aktif; Alam/Produksi sebagai Goal Pasif. Penggunaan modalitas epistemik (“ <i>Kita pastikan</i> ”).	Hegemoni Antroposentris: Negara mengklaim otoritas penuh untuk mengendalikan masa depan ekosistem.	Marginalisasi Agensi Alam: Menghilangkan fakta bahwa tanah memiliki batas kemampuan regenerasi yang tidak bisa dipaksa oleh kebijakan.
Ekolinguistik Kritis (Stibbe's Framework)	Munculnya narasi <i>Destructive Stories</i> (Anam, 2024).	Instrumentalisasi: Alam diposisikan sebagai mesin yang harus dipacu tanpa henti demi target produksi nasional.	Infinite Growth Myth: Melegitimasi eksploitasi lahan secara kontinu di atas planet yang memiliki batas-batas biosfisk (<i>Planetary Boundaries</i>).

Tabel 4.8 Matriks Signifikansi Temuan (Research Novelty)

Aspek	Penelitian Terdahulu (Separated Approach)	Penelitian Ini (Integrated Approach)
Fokus Kajian	Hanya analisis bahasa kebijakan secara tekstual atau analisis ekonomi secara parsial.	Menghubungkan teks pidato dengan Materialitas Alam (New Materialism).
Representasi	Alam seringkali diabaikan atau dianggap sebagai latar belakang kebijakan.	Alam dianalisis sebagai subjek yang ditidakan agensinya melalui strategi bahasa.
Implikasi	Menekankan pada efektivitas komunikasi politik.	Menekankan pada Krisis Ekologis Struktural yang dipicu oleh metafora kebijakan.

Melalui matriks temuan ini, terlihat jelas bahwa kebijakan penurunan harga pupuk 20% dijalankan melalui strategi linguistik ganda yakni di satu sisi melakukan *legitimasi ekonomi* bagi petani, namun di sisi lain melakukan *delegitimasi ekologis* terhadap tanah. Representasi alam sebagai ‘objek statis’ yang ditemukan dalam dekonstruksi leksikal (Tabel 4.7) membuktikan bahwa ideologi

pembangunan pertanian Indonesia masih terjebak dalam paradigma antroposentrisme radikal, di mana kesehatan ekosistem dikorbankan demi stabilitas harga dan angka produksi jangka pendek.

Temuan-temuan analisis wacaba jika ditinjau berdasarkan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan tantangan *Climate Change* menerbitkan paradigma dialektika kebijakan populis dan krisis ekologis global. Artinya temuan dalam penelitian ini menyingkap adanya ketegangan mendasar antara retorika kebijakan populis dan ambisi keberlanjutan global yang tertuang dalam SDGs, khususnya poin 2 (*Zero Hunger*) dan poin 12 (*Responsible Consumption and Production*). Meskipun penurunan harga pupuk sebesar 20% secara diskursif diposisikan sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan, analisis ekolinguistik kritis menunjukkan bahwa kebijakan ini justru berpotensi memicu degradasi tanah yang sistematis. Sebagaimana dikemukakan dalam kategori *destructive discourse*, pengabaian agensi material tanah dalam pidato Menteri Pertanian menciptakan "cerita dominan" yang memisahkan produktivitas pertanian dari integritas ekosistem. Dalam jangka panjang, narasi yang hanya menekankan intensifikasi input kimiawi ini akan mengeksaserbasi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, yang secara langsung memperburuk laju perubahan iklim (*Climate Change*).

Ketiadaan diksi mengenai "pemulihan tanah" atau "pupuk organik" dalam wacana resmi tersebut mengonfirmasi adanya biopolitik pertanian yang mengutamakan stabilitas ekonomi jangka pendek di atas ketahanan ekosistem jangka panjang. Temuan ini selaras dengan kekhawatiran global bahwa kebijakan subsidi input sering kali menjadi jebakan ketergantungan (*path dependency*) yang menghalangi transisi menuju sistem pangan berkelanjutan. Representasi alam sebagai "objek statis" dan "wadah kimia" dalam pidato tersebut tidak hanya mencerminkan ideologi antroposentris, tetapi juga bentuk kegagalan komunikasi publik dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekosentrisme ke dalam kebijakan negara. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap wacana ini menjadi mendesak untuk mendorong pergeseran paradigma dari pertanian eksploitatif menuju pertanian regeneratif yang mengakui alam sebagai mitra ko-eksistensi, bukan sekadar instrumen teknokratis.

Pidato Menteri Pertanian secara konsisten menggunakan strategi leksikalisasi, metaforisasi, dan nominalisasi untuk melanggengkan ideologi pembangunan yang bersifat teknosentris. Alam direpresentasikan sebagai entitas pasif (*infertil*) yang memerlukan intervensi negara, sehingga melegitimasi penggunaan input kimiawi tanpa mempertimbangkan ambang batas ekologis. Disarankan agar komunikasi publik kementerian mulai mengadopsi *green discourse* yang lebih seimbang, dengan menekankan pentingnya kesehatan tanah (*soil health*) sebagai fondasi kedaulatan pangan, serta mengintegrasikan narasi agroekologi guna memitigasi dampak perubahan iklim.

Ideologi Pembangunan Pertanian Direproduksi dan Di Legitimasi Strategi Wacana Pidato Menteri Pertanian

Ideologi pembangunan pertanian dalam pidato Menteri Pertanian direproduksi melalui strategi rasionalisasi teknokratis dan naturalisasi ketergantungan, di mana penurunan harga pupuk 20% dikonstruksikan sebagai satu-satunya nalar logis untuk mencapai kedaulatan pangan. Strategi ini bekerja dengan cara menyederhanakan isu ekologis yang kompleks menjadi sekadar variabel fiskal dan angka produksi, sehingga menciptakan narasi "keberhasilan ekonomi" yang menutup ruang bagi model pertanian alternatif. Berdasarkan perspektif ekolinguistik kritis, penggunaan modalitas epistemik yang kuat (seperti "*kita pastikan*") dan nominalisasi proses berfungsi untuk melenyapkan agensi material alam, mengubah tanah dari subjek biologis yang hidup menjadi sekadar objek pasif yang nilai keberadaannya sepenuhnya bergantung pada intervensi kimiawi negara.

Legitimasi ideologi ini diperkuat melalui strategi hegemonisasi heroik, di mana negara memosisikan diri sebagai penyelamat kesejahteraan petani melalui kebijakan "pupuk murah", sekaligus menyembunyikan beban ekologis jangka panjang yang harus ditanggung oleh lingkungan. Dengan membungkus pupuk sebagai "udara" atau unsur vital yang harus tersedia secara masif, wacana ini mereproduksi paradigma antroposentrisme radikal yang melegitimasi pertumbuhan tanpa batas (*infinite growth*) di atas ekosistem yang terbatas. Akibatnya, praktik diskursif-material ini tidak hanya mengunci petani dalam pola ketergantungan industri kimia, tetapi juga menormalisasi eksploitasi agensi tanah demi stabilitas pasar jangka pendek, yang secara fundamental mengabaikan prinsip keberlanjutan dalam kerangka pembangunan pertanian modern di Indonesia.

Tabel 4.9 Data Temuan Reproduksi Dan Legitimasi Ideologi Pembangunan Pertanian Bentuk Depolitisasi

No	Jenis bahasa kebijakan	Kode data	Data	Durasi	Kutipan Verbatim	Strategi Wacana	Bentuk Legitimasi	Ideologi yang Direproduksi	Indikator Praktik Sosial
1.	Legitimasi	001/AWE/LEG/VY/220205	Otorisasi kebijakan melalui Presiden	0.03-0.09	"Bapak Presiden menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk."	Otorisasi	Legitimasi institusional	Pembangunan top-down	Negara pusat otoritas
		002/AWE/LEG/VY/220205	Penegasan arahan presiden sebagai dasar tindakan	0.10-0.15	"Arahan Presiden jelas..."	Penguatan hierarki	Legitimasi koersif simbolik	Negara kuat & protektif	Kepatuhan struktural
		003/AWE/LEG/VY/220205	Penetapan kebijakan oleh pemerintah	1.05-1.12	"Kebijakan ini diputuskan pemerintah."	Institusionalisasi	Legitimasi formal	Modernisasi tata kelola	Negara sebagai aktor rasional
2.	Naturalisasi	001/AWE/NAT/VY/220205	Penurunan harga tanpa penambahan anggaran negara	5.48-5.58	"Ini tidak menambah anggaran APBN tetapi menurunkan harga 20%."	Rasionalisasi ekonomi	Legitimasi efisiensi anggaran	Efisiensi sebagai nilai utama	Kebijakan sebagai legitimasi
		002/AWE/NAT/VY/220205	Efisiensi sebagai dasar kebijakan	5.36-5.43	"Hasil dari efisiensi efektif produktif."	Teknokratisasi	Legitimasi progresivitas	Pembangunan sebagai lompatan baru	Bahasa manajerial dominan
		003/AWE/NAT/VY/220205	Proyeksi kenaikan produksi	4.09-4.15	"Produksi akan naik."	Prediksi pasti	Legitimasi berbasis output	Pembangunan berbasis capaian	Pertumbuhan dianggap alami
3.	Instrumentalisasi	001/AWE/INS/VY/220205	Pupuk sebagai unsur vital produksi pertanian	0.14-0.21	"Pupuk adalah udaranya pertanian."	Metafora vital	Legitimasi kebutuhan produksi	Modernisasi pertanian	Alam sebagai faktor produksi
		002/AWE/INS/VY/220205	Target peningkatan produksi nasional	4.10-4.15	"Peningkatan produksi."	Nominalisasi output	Legitimasi capaian	Pembangunan berbasis output	Fokus pada hasil kuantitatif
		003/AWE/INS/VY/220205	Kuantifikasi volume produksi pupuk	1.45-1.50	"Volume 9,55 juta ton."	Kuantifikasi	Legitimasi teknokratis	Rasionalitas ekonomi	Alam sebagai komoditas tenulur
4.	Hegemonisasi	001/AWE/HEG/VY/220205	Klaim kebijakan sebagai kabar baik nasional	6.18-6.25	"Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia."	Nasionalisasi	Legitimasi populis	Pembangunan demi rakyat	Konsensus simbolik
		002/AWE/HEG/VY/220205	Representasi dukungan mayoritas petani	6.20-6.30	"160 juta warga petani menanti berita ini."	Kuantifikasi populasi	Legitimasi mayoritas	Negara representasi rakyat	Dukungan kolektif
		003/AWE/HEG/VY/220205	Orientasi kesejahteraan petani	3.00-3.08	"Demi kesejahteraan petani."	Retorika kesejahteraan	Legitimasi etis	Pembangunan humanistik	Moralitas kebijakan
5.	Depolitisasi	001/AWE/DEP/VY/220205	Efisiensi sistem tata kelola pupuk	5.36-5.43	"Efisiensi efektif produktif."	Bahasa teknokratis	Legitimasi efisiensi birokrasi	Modernisasi tata kelola	Masalah struktural diperlembahkan
		002/AWE/DEP/VY/220205	Perbaikan sistem distribusi	3.15-3.20	"Distribusi diperbaiki."	Pasivisasi	Legitimasi administratif	Negara kuat & protektif	Aktor konflik dihilangkan
		003/AWE/DEP/VY/220205	Penurunan harga pupuk	3.26-3.30	"Penurunan harga."	Nominalisasi	Legitimasi berbasis capaian	Output sebagai ukuran utama	Konflik subsidi dihapus dari wacana

Terapan analisis makro (sosiopolitik), bukan lagi sekadar "apa yang dikatakan tentang alam", melainkan "bagaimana kekuasaan dilegitimasi untuk mempertahankan status quo pembangunan". Analisis membongkar strategi legitimasi ideologi dalam pidato Menteri Pertanian. Strategi legitimasi rasionalisasi ekonomi vs ekologi, analisis dimulai dengan bagaimana penurunan harga pupuk 20% dikonstruksikan sebagai kebenaran tunggal yang tak terbantahkan. Analisis terhadap data 001/LEG hingga 003/LEG menunjukkan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk dikonstruksikan sebagai sebuah kebenaran tunggal yang tidak terbantahkan melalui mekanisme otorisasi dan rasionalisasi yang ketat. Mekanisme penerapan teori Van Leeuwen tentang legitimasi, meninjau bagaimana menteri menggunakan "otoritas" (sebagai pejabat negara) dan "rasionalisasi" (demi kesejahteraan petani) untuk membenarkan ketergantungan pada pupuk kimia.

Mengacu pada teori legitimasi Van Leeuwen, Menteri Pertanian menggunakan otorisasi personal dan institusional dengan terus mengeksploitasi nama "Presiden" (Data 001/LEG & 002/LEG). Pernyataan seperti "Bapak Presiden menyampaikan lakukan revitalisasi" dan "Arahan Presiden jelas" berfungsi untuk memindahkan beban tanggung jawab dari perdebatan ilmiah ke ranah komando politik. Legitimasi ini diperkuat dengan rasionalisasi tujuan etis "demi kesejahteraan petani" (Data 003/HEG). Penggabungan otoritas negara yang kuat dengan janji kesejahteraan menciptakan perisai diskursif yang membenarkan kelanjutan ketergantungan pada pupuk kimia sebagai satu-satunya solusi teknokratis yang sah.

Reduksionis ekologi ke dalam isu harga terfokus pada wacana pada angka "20%", menteri melakukan reduksionisme, di mana isu ekologi yang kompleks disederhanakan menjadi isu harga. Ini adalah cara melegitimasi ideologi pembangunan bahwa "ekonomi yang tumbuh selalu berarti kemajuan". Dengan memfokuskan seluruh energi wacana pada angka "20%" (Data 001/LEK & 003/DEP), Menteri melakukan simplifikasi radikal terhadap krisis agraria yang sebenarnya kompleks. Isu kesehatan tanah, degradasi ekosistem mikro, dan dampak buruk jangka panjang zat kimia disederhanakan menjadi isu "harga" dan "efisiensi anggaran" (Data 001/NAT). Narasi ini secara efektif melegitimasi ideologi pembangunan modern bahwa "ekonomi yang tumbuh selalu berarti kemajuan". Dalam kerangka ini, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari integritas ekologis lahan pertanian, melainkan dari keterjangkauan input kimiawi dan kecepatan distribusi (Data 002/DEP), yang secara tidak langsung menutup mata terhadap biaya ekologis yang harus dibayar di masa depan.

Legitimasi ideologi strategi naturalisasi terfokus pada teks makna menormalisasi ketergantungan kimia. Analisis merujuk pada paradigma bagaimana penggunaan pupuk kimia diposisikan sebagai hal yang "alami" dan "niscaya" dalam bertani. Analisis pada data 001/NAT hingga 003/NAT mengungkap bagaimana kebijakan ini diposisikan sebagai sebuah keniscayaan yang logis melalui strategi naturalisasi. Strategi ini bertujuan untuk menghapus kesan bahwa kebijakan tersebut adalah pilihan politik yang bisa diperdebatkan, melainkan menjadikannya sebagai fakta alamiah yang mutlak.

Dalam perspektif Fairclough, cari bagian pidato yang menyiratkan bahwa tanpa pupuk subsidi/murah, pertanian akan runtuh; Dalam perspektif Fairclough, menteri memposisikan penggunaan pupuk kimia sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari keberhasilan tani. Melalui data 002/NAT ("Hasil dari efisiensi efektif produktif"), terminologi manajerial digunakan untuk membingkai ketergantungan pada input kimia sebagai bentuk "progresivitas". Berdasarkan konsep Stibbe (2025) mengenai *Destructive Discourse*, narasi ini menaturalisasi gagasan bahwa tanah adalah entitas yang "sakit" dan memerlukan "obat" kimiawi secara terus-menerus agar tetap produktif. Dengan mengaitkan

efisiensi anggaran (Data 001/NAT) dengan ketersediaan pupuk, menteri membangun kesan bahwa tanpa subsidi dan penggunaan pupuk kimia yang masif, sistem pertanian nasional secara alamiah akan runtuh.

Analisis pembangunan sebagai keniscayaan tanpa alternatif, ekolinguistik konsep Stibbe (2025) tentang *Destructive Discourse*, narasi menaturalisasi gagasan bahwa tanah adalah "pasien" yang sakit dan memerlukan "obat" (pupuk kimia) secara terus-menerus. Dengan menaturalisasi ketergantungan ini, ideologi pembangunan modern berbasis input luar dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Narasi ini bekerja dengan menempatkan proyeksi kenaikan produksi (Data 003/NAT) sebagai hukum alam yakni harga turun, maka produksi "pasti" naik. Ini adalah bentuk teknokratisasi wacana yang menghilangkan pertimbangan ekologis.

Penurunan harga 20% dianggap sebagai solusi universal yang menyingkirkan kemungkinan narasi lain, seperti pemulihan tanah secara organik atau transisi menuju agroekologi. Dengan menaturalisasi ketergantungan ini, ideologi pembangunan modern berbasis input kimia dilegitimasi sebagai satu-satunya jalan keluar yang rasional, sehingga suara-suara kritis mengenai kerusakan tanah struktural dianggap sebagai hambatan bagi "keniscayaan" pertumbuhan yang sedang diupayakan pemerintah.

Narasi analisis strategi depolitisasi menghilangkan alternatif ekologis, membongkar bagaimana pidato tersebut menutup ruang bagi narasi lain, seperti pertanian organik atau pemulihan tanah secara alami. Analisis terhadap data 001/DEP hingga 003/DEP menunjukkan penggunaan bahasa teknokratis dan administratif yang secara cerdas menyembunyikan masalah struktural tanah dan konflik kepentingan di balik tabir efisiensi birokrasi. Teridentifikasi menyembunyikan krisis di balik bahasa administrasi, mekanisme strategi ini bekerja dengan cara tidak menyebutkan sama sekali dampak jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia. Menteri menggunakan strategi depolitisasi dengan mengalihkan isu kebijakan dari ranah perdebatan ekologis-politik ke ranah "tata kelola" dan "perbaikan sistem". Melalui kutipan "*Efisiensi efektif produktif*" (Data 001/DEP) dan "*Distribusi diperbaiki*" (Data 002/DEP), masalah mendasar seperti kejenuhan tanah akibat residu kimia dan penolakan sebagian kelompok tani terhadap pola intensifikasi dihilangkan dari wacana. Strategi ini bekerja dengan mengubah tindakan politik yang sarat risiko lingkungan menjadi sekadar prosedur administratif yang tampak netral dan "bebas masalah".

Kemudian teridentifikasi penghilangan aktor konflik dan narasi alternatif, maknanya bahwa dengan tidak adanya penyebutan ambang batas ekologis, kebijakan ini direproduksi sebagai solusi "bebas masalah". Ini melegitimasi ideologi pembangunan yang berorientasi pada hasil jangka pendek (*short-termism*) dan mengaburkan tanggung jawab negara terhadap krisis tanah struktural. Penggunaan nominalisasi dan pasivisasi pada frasa "*Penurunan harga*" (Data 003/DEP) dan "*Distribusi diperbaiki*" berfungsi untuk menyamarkan aktor-aktor yang mungkin terlibat dalam konflik ekonomi-ekologi, seperti perusahaan pupuk atau spekulasi, sekaligus membungkam narasi alternatif. Dengan tidak adanya penyebutan mengenai ambang batas ekologis atau dampak negatif jangka panjang dari penggunaan kimia, kebijakan ini direproduksi sebagai solusi "bebas konflik". Narasi ini melegitimasi ideologi pembangunan yang berorientasi pada hasil jangka pendek (*short-termism*), di mana tanggung jawab negara terhadap krisis tanah struktural dikesampingkan demi menonjolkan keberhasilan teknis birokrasi yang tampak sempurna secara administratif.

Tinjau strategi hegemonisasi menciptakan "konsensus simbolik" (kelangkaan dan harga), identifikasi lebih diarahkan pada bagaimana menteri membangun narasi bahwa musuh utama petani adalah "harga mahal" dan "kelangkaan", bukan "kerusakan tanah". Analisis pada data 001/HEG hingga 003/HEG mengungkap bagaimana wacana penurunan harga pupuk digunakan untuk membangun dukungan massa melalui strategi hegemonisasi, yang bertujuan menyatukan kepentingan negara dengan harapan masyarakat luas. Ketika harga diturunkan, menteri tampil sebagai pahlawan (*heroic narrative*). Ini adalah strategi hegemonisasi di mana petani (sebagai subjek) diarahkan untuk merasa beruntung mendapatkan pupuk murah, sehingga mereka secara sukarela menerima praktik pertanian yang sebenarnya merusak lingkungan mereka sendiri dalam jangka panjang.

Melalui kutipan "*Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia*" (Data 001/HEG) dan klaim kuantitatif "*160 juta warga petani menanti*" (Data 002/HEG), Menteri menjalankan strategi nasionalisme dan populisme. Berdasarkan teori Gramsci, hegemonisasi terjadi ketika kelompok dominan (negara) mampu memenangkan persetujuan sukarela dari kelompok yang didominasi (petani). Dengan membingkai kebijakan ini sebagai "kabar baik", menteri membangun musuh bersama berupa "harga mahal" dan "kelangkaan", sehingga mengalihkan perhatian publik dari ancaman nyata berupa kerusakan tanah akibat penggunaan kimia yang berlebihan. Petani diarahkan untuk merasa

beruntung mendapatkan pupuk murah, yang pada gilirannya meniadakan resistensi terhadap model pertanian intensif yang merusak lingkungan.

Legitimasi etis di balik pembangunan humanistik, merujuk pandangan Syafrudin & Marwan (2023) bahwa praktik diskursif-material ini mengunci petani dalam relasi fisik dengan bahan kimia melalui kebijakan harga. Strategi ini mencapai puncaknya pada penggunaan retorika *"Demi kesejahteraan petani"* (Data 003/HEG). Ini merupakan bentuk legitimasi etis yang memberikan wajah humanistik pada ideologi pembangunan yang sebenarnya bersifat eksploitatif. Narasi kesejahteraan ini sangat efektif untuk membungkam kritik ekologis; siapa pun yang mempertanyakan dampak kimiawi pupuk akan dianggap menentang kesejahteraan petani. Dengan demikian, hegemoni ini berhasil menciptakan konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dicapai meskipun alam harus menanggung beban degradasi. Hal ini mengunci petani ke dalam relasi material dengan bahan kimia, sekaligus memperkuat kekuasaan negara sebagai satu-satunya penjamin kelangsungan hidup rakyat di tengah ketergantungan ekosistem yang rapuh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidato Menteri Pertanian mengenai penurunan harga pupuk 20% bukan sekadar pengumuman kebijakan fiskal, melainkan sebuah instrumen hegemonik yang mereproduksi ideologi pembangunan pertanian teknosentris. Melalui strategi otorisasi dan rasionalisasi ekonomi, negara berhasil melakukan depolitisasi terhadap risiko ekologis dengan menyederhanakan krisis tanah menjadi isu harga pasar. Dominasi strategi naturalisasi dan metaforisasi vital (seperti pupuk sebagai 'udara') secara sistematis menyapukan agensi material alam, menempatkan ekosistem dalam posisi pasif yang cacat, dan melegitimasi ketergantungan kimiawi sebagai satu-satunya nalar logis pembangunan. Akibatnya, kebijakan ini menciptakan konsensus simbolik yang memenangkan stabilitas ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan ekosistem jangka panjang, sekaligus mempertegas posisi antroposentrisme radikal dalam tata kelola agraria di Indonesia."

Tabel 4.10: Matriks Integratif Strategi Wacana (Mikro) dan Legitimasi Ideologi (Makro).

Strategi Wacana	Temuan Utama (Data Verbatim)	Mekanisme Legitimasi	Ideologi yang Direproduksi	Dampak Ekologis (Ekokritik)
Otorisasi	"Bapak Presiden menyampaikan..."	Legitimasi Institusional	Pembangunan Top-Down	Menghilangkan kearifan lokal & agensi tanah dalam kebijakan
Rasionalisasi	"Efisiensi efektif produktif"	Legitimasi Teknokratis	Produktivisme	Isu kerusakan tanah disederhanakan menjadi masalah administratif.
Naturalisasi	"Pupuk adalah udaranya pertanian"	Legitimasi Biologis	Teknosentrisme	Ketergantungan kimiawi dianggap sebagai hukum alam yang niscaya.
Hegemonisasi	"Kabar baik bagi 160 juta petani"	Legitimasi Populis	Hegemoni Negara	Mengunci petani dalam sistem kimiawi melalui konsensus kesejahteraan.
Depolitisasi	"Penurunan harga" (tanpa aktor)	Legitimasi Administratif	Short-termism	Menyembunyikan konflik kepentingan dan beban ekologis jangka panjang.

Tabel 4.11: Matriks Temuan Dekonstruksi Legitimasi (*Research Contribution*)

Dimensi	Konstruksi Wacana (Kondisi Saat Ini)	Realitas Ekologis yang Disembunyikan	Posisi Ideologis
Subjek vs Objek	Negara sebagai "Penyelamat" (Aktif); Petani/Alam sebagai "Penerima" (Pasif).	Tanah kehilangan kemampuan regenerasi alami akibat akumulasi residu kimia.	Antroposentrisme Radikal
Nilai Alam	Alam sebagai mesin produksi yang diukur dengan angka "ton" dan "rupiah".	Alam memiliki batas metabolisme (<i>Planetary Boundaries</i>) yang bersifat terbatas.	Materialisme Instrumental
Solusi Krisis	Penurunan harga input kimia dianggap sebagai solusi final.	Diperlukan transisi menuju agroekologi dan pemulihan agensi biologi tanah.	Tekno-Optimisme

Tabel berikut menghubungkan data empiris (kutipan pidato) dengan teori-teori besar yang telah dibangun (Fairclough, Stibbe, New Materialism).

Tabel 4.12 Sintesis Analisis Wacana Ekokritik dan Legitimasi Ideologi

No	Data (Kutipan Pidato/Kata Kunci)	Strategi Wacana (Fairclough)	Representasi Alam (Ekokritik/Stibbe)	Ideologi Pembangunan yang Dilegitimasi
1	"Kita turunkan harga pupuk 20% agar produksi nasional melonjak tajam."	Rasionalisasi Instrumental (Menghubungkan harga dengan target angka).	Alam sebagai Pabrik: Tanah direduksi menjadi alat produksi pasif yang output-nya ditentukan oleh input kimia.	Produktivisme: Keberhasilan pembangunan hanya diukur dari volume panen, bukan kesehatan ekosistem.
2	"Pupuk ini adalah solusi mutlak bagi nasib petani kita hari ini."	Naturalisasi (Menyajikan kebijakan sebagai satu-satunya jalan keluar).	Stories We Live By (Destructive): Membangun narasi ketergantungan bahwa alam tidak mampu berproduksi tanpa intervensi kimiawi.	Teknosentrisme: Keyakinan bahwa masalah pertanian hanya bisa diselesaikan dengan teknologi kimia, bukan pemulihan ekologis.
3	"Stabilitas harga adalah prioritas utama pemerintah."	Depolitisasi/Nominalisasi (Menonjolkan aspek ekonomi, menyembunyikan aspek ekologi).	Negasi Agensi Material: Menghilangkan fakta bahwa tanah memiliki batas regenerasi; alam dianggap memiliki daya dukung tak terbatas.	Ekonomi Neoliberal: Prioritas pada stabilitas pasar dan keterjangkauan input industri di atas keberlanjutan sumber daya alam.
4	"Mulai hari ini, tidak ada lagi kelangkaan, semua harus berlipat ganda."	Hegemonisasi Heroik (Pemerintah sebagai pahlawan pemberi kemudahan).	Alam sebagai Objek Kendali: Representasi alam yang harus tunduk pada instruksi negara dan percepatan waktu produksi manusia.	Antroposentrisme Radikal: Kepentingan manusia (stabilitas harga/politik) mutlak berada di atas sistem metabolisme alam.

Berdasarkan data pada tabel di atas, temuan kebahasaan dalam pidato Menteri Pertanian didominasi oleh penggunaan leksikon produksi, harga, dan stabilitas yang muncul secara repetitif, menandakan adanya pergeseran fokus dari ekologi ke arah rasionalitas ekonomi instrumental. Dominasi kata "produksi" yang dikaitkan secara kausal dengan "penurunan harga pupuk" menunjukkan bahwa keberhasilan agraria hanya diukur melalui variabel kuantitatif, di mana alam (tanah) direduksi menjadi "pabrik" atau alat produksi pasif yang outputnya sepenuhnya dikendalikan oleh input kimiawi. Secara ekokritik, pilihan kata tersebut membentuk representasi alam yang "lemah" atau "infertil" secara alami, sehingga membutuhkan "penyelamatan" melalui teknologi kimia. Sebagaimana kerangka *Stories*

We Live By dari Stibbe, narasi ini membangun cerita destruktif bahwa tanpa intervensi kimiawi masif dari negara, alam dianggap tidak berdaya, sebuah bentuk naturalisasi ketergantungan yang mengabaikan daya regenerasi mandiri ekosistem.

Dilihat dari perspektif *New Materialism*, wacana "harga murah" dan "stabilitas" ini memiliki dampak material yang nyata namun disembunyikan (*silenced*) dalam teks pidato, yakni potensi penumpukan residu zat kimia secara fisik di dalam tanah yang merusak agensi biologi mikroba. Sintesis ideologinya menunjukkan bahwa pidato ini bukan sekadar bantuan ekonomi populis, melainkan instrumen antroposentrisme radikal yang bertujuan mengunci petani dalam sistem pertanian industri eksploitatif. Narasi "manis" mengenai keterjangkauan harga pupuk bertindak sebagai alat hegemonik yang melegitimasi eksploitasi lahan berlebihan (*over-exploitation*) demi target makroekonomi jangka pendek. Dengan mengabaikan batas metabolisme alam, wacana ini memperkokoh ideologi teknosentrisme yang memosisikan manusia sebagai pengontrol mutlak atas alam, sekaligus mengaburkan fakta bahwa pertumbuhan produksi yang dipaksakan secara kimiawi akan berujung pada keruntuhan ekologis secara struktural di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis berbasis ekokritik dan ekolinguistik terhadap pidato Menteri Pertanian, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok, *pertama*, representasi alam sebagai objek statis, yakni alam secara konsisten dibangun melalui leksikon kuantitatif dan metafora biologis yang manipulatif. Penggunaan diksi seperti "volume", "target produksi", dan metafora "pupuk sebagai udara" menunjukkan bahwa alam direduksi menjadi sekadar instrument teknokratis dan "wadah" bagi input kimia. Alam direpresentasikan sebagai entitas yang cacat secara fungsional sehingga melegitimasi intervensi teknologi negara sebagai satu-satunya cara untuk mencapai produktivitas. Hal ini mengonfirmasi adanya paradigma antroposentrisme radikal yang menafikan agensi material tanah dan batas-batas ekologis. Kedua, legitimasi ideologi pembangunan, bermakna ideologi pembangunan pertanian yang bersifat produktivisme dan teknosentrisme direproduksi melalui strategi legitimasi, naturalisasi, dan depolitisasi. Dengan memfokuskan wacana pada angka penurunan harga 20%, negara berhasil menyederhanakan krisis agraria yang kompleks menjadi sekadar isu fiskal. Strategi hegemonisasi melalui narasi populis "kesejahteraan petani" digunakan untuk membangun konsensus simbolik, yang secara efektif menyembunyikan ancaman degradasi lingkungan jangka panjang di balik janji keuntungan ekonomi jangka pendek (*short-termism*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H. F. (2024). *Antara Destructive, Beneficial, Dan Ambivalent: Membongkar Ideologi Lingkungan Khittah Perjuangan Hmi Mpo Melalui Analisis Wacana Eko-Kritis*. At-Thariq: Jurnal Studi Islam Dan Budaya, 4(02), 22-32.
- Ardiansyah, A. A., et al. (2025). *Tanggung Jawab Sosial Serta Kemanusiaan Masyarakat Buddhis*. Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya, 3(1), 01-10.
- Astawa, I. G. (2025). *Ekolinguistik Kritis: Teori Dan Penerapannya*. Nilacakra.
- Astawa, I. G., et al. (2025). *Ekolinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris: Perspektif Lingkungan Dan Bahasa*. Nilacakra.
- Bahar, A. A., Marijan, K., & Mardiyanta, A. (2025). *Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Fairclough, N. (2023). *Critical Discourse Analysis*. In *The Routledge Handbook Of Discourse Analysis* (Pp. 11-22). Routledge.
- Hadi, S., & Nadlifah, R. F. (2023). *Realitas Bernalar Kritis Elemen Profil Pelajar Pancasila Wacana Membaca Buku Teks Bahasa Indonesia Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual, 7(4), 598-613.
- Hariati, P. (2025). *Bahasa Yang Terluka: Ekolinguistik Dalam Krisis Ekologi Global*. Serasi Media Teknologi.
- Hariati, P. (2025). *Pengantar Ekolinguistik: Menyatukan Bahasa Dan Alam*. Serasi Media Teknologi.
- Harmi, H., & Sumarto, S. (2024). *Bentuk Penggunaan Sim Untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Data Informasi Di SDIT Rabbi Radhiyyah 01 Sidorejo* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Hermawan, A., & Hadi, S. (2021). *Akulturasi Budaya Baca Terhadap Tindak-Tutur Direktif Aup Era Digital (Kajian Kelompok Belajar Tk Pkk I Kelurahan Bendogerit Kota Blitar)*. Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 6(1), 99-109.

- Hermawan, A., & Zahro, N. H. (2021). *Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi Bahasa Indonesia Dalam Makalah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 2 (Dua) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar*. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 5(3), 412-418.
- Mahardika, D. A., et al. (2025). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, I. (2023). *Analisis Wacana Kritis (Teori Dan Praktik)*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Unimudapress.
- Maulida, R., et al. (2025). *Pengaruh Media Mini Book Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Kelas Iv Sdn 73 Rejang Lebong* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup).
- Mufidah, Ni, et al. (2025). *Peningkatan Penelitian Ekokritis 2014—2024: Analisis Bibliometrik*. *Diglossia: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, 8 (2), 375-392.
- Muhtar, S. M., Sos, S., Sh, M., & Akbar, M. (2025). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Divya Media Pustaka.
- Nasarudin, N., et al. (2025). *Bahasa, Alam, Dan Kesadaran Ekologis*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ninditya, A. E. A. (2025). *Dinamika Bentuk Dan Makna Makanan Dan Minuman Tradisional Di Kota Surakarta (Kajian Etnolinguistik)*.
- Novilia, E., et al. (2023). *Pembelajaran Berpikir Kritis Kreatif Mahasiswa Unu Blitar Dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 7(2), 275-285.
- Novilia, E., et al. (2023). *Pembelajaran Berpikir Kritis Kreatif Mahasiswa Unu Blitar Dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 7(2), 275-285.
- Nuryanti, D., et al. (2025). *Bahasa Dan Sastra Dalam Krisis Iklim: Perspektif Ekokritis Indonesia*. Cv. Media Manifesto Intelektual.
- Prayogi, R. (2023). *Media, Wacana Korupsi, Dan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*. Selat Media.
- Putri, L. (2025). *Analisis Ekolinguistik Terhadap Pemberitaan Isu Lingkungan Di Provinsi Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman*. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77-84.
- Sari, Fp, Munajat, M., Lastinawati, E., Meilin, A., Judijanto, L., Sutiharni, S., ... & Rusliyadi, M. (2024). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Pt. Sonpedia Penerbitan Indonesia.
- Sari, M. F. (2023). *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Behavior Contract Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di Smp Negeri 1 Rumbia Tahun Pelajaran 2022/2023* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Seafinus, R. O. (2022). *Analisis Kalimat Imperatif Pada Tuturan Masyarakat Dayak Kanayatn Dialek Ahe Kabupaten Bengkayang* (Doctoral Dissertation, Ikip Pgri Pontianak).
- Setyonegoro, A., & Priyanto, P. (2025). *Analisis Ekolinguistik Terhadap Pemberitaan Isu Lingkungan Di Provinsi Jambi*. *Pena Literasi*, 8(1), 112-121.
- Susanto, D., et al. (2023). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan Islam*. Pt Salim Media Indonesia.
- Syafrudin, I., & Maiwan, M. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. Unj Press.
- Wiryanan, Ma (2025). *Kritik Lingkungan Dalam Lagu Burung Walet Dan Tikus Tua Oleh Fstvlst* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Zahroh, A. (2024). *Inisiasi Eko-Teopolaritas Perspektif Al-Qur'an (Kajian Penafsiran Sachiko Murata Terhadap Ayat Berwawasan Lingkungan)* (Doctoral Dissertation, Institut Ptiq Jakarta).